

BAB III

PEMBAHASAN

3.1 Jaringan Kerjasama SATUNAMA

Membangun sebuah relasi sangatlah penting, terutama bagi organisasi-organisasi non-pemerintah yang dalam melaksanakan kegiatannya membutuhkan dana dari sebuah pendonor atau pun lembaga lainnya. Ada banyak lembaga yang menjalin relasi dengan SATUNAMA. Tidak hanya dengan Pemerintah Provinsi, Pemerintahan Desa, Kementerian/Dinas/Pemerintah, melainkan juga dengan pihak swasta maupun organisasi *non-state* lainnya. SATUNAMA dalam membangun relasi dengan pemerintah lokal khususnya yang berada di Daerah Istimewa Yogyakarta menggandeng beberapa kabupaten/kota dalam menjalankan program kegiatannya antara lain; Pemerintah Kabupaten Sleman, Gunung Kidul, Kota Jogja dan Kulonprogo. Beberapa mitra yang menjalin kerjasama dengan SATUNAMA selain Pemerintah yaitu lembaga donor (Lembaga donor pada tahun 2016 adalah ; TAF Program Peduli, KAS, Misereor, Kindermission, MCAI, KPK – PCB, AVI), Perguruan Tinggi (SKHU-Korea, Universitas Ciputra, UGM, UII, Melbourne University, Atmajaya Jogja), Parpol, Pers (Tribun Jogja, AJI Jogja, Kompas, Bernas, KPK, LkiS, eLSA, Gramedia, Jakarta Post, Tempo), Keuskupan Agats dan

Kindermission, Mitra Lokal, KASYP Singapore, Potensial Partner, LSM Nasional, Depdikbud dan Sekolahan SMP – SMP di 19 propinsi.

Dalam era globalisasi yang semakin menghilangkan sekat-sekat kehidupan bermasyarakat serta meningkatnya tanggung jawab bersama terhadap perbaikan kualitas hidup manusia, fungsi jaringan dalam kerja-kerja LSM menjadi semakin penting. Dalam kondisi semacam itu mustahil LSM akan bekerja sendirian tanpa berjejaring dengan organisasi lain, padahal LSM tersebut mempunyai kepedulian – keprihatinan yang sama. Seperti halnya pada program pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh SATUNAMA dalam memfasilitasi pemerintah Kecamatan Desa terkait tata kelola pemerintahan, perencanaan pembangunan serta memfasilitasi inisiatif Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang bekerjasama dengan Pemerintah Kabupaten Gunung Kidul, Bantul dan Sleman. Adanya relasi dengan pemerintah dapat mendukung keberlangsungan program atau kegiatan tersebut. karena sebagaimana yang diketahui bahwa dalam melakukan suatu pembangunan, perlu adanya kerjasama antara Masyarakat, Pemerintah maupun pihak ketiga seperti swasta.

Banyaknya relasi ataupun mitra kerja yang dimiliki oleh SATUNAMA, sangat membantu SATUNAMA dalam menjalankan sebuah program. Sebagaimana yang diketahui bahwa SATUNAMA sendiri merupakan lembaga *non profit* yang berbasis pada gerakan moral. Tetapi seperti yang dipahami, bahwa tanpa dana, LSM akan seperti “kerakap di

atas batu, mati tidak hidup tak mau...”. Maka, tingkat keberlanjutan pendanaan juga bisa menjadi salah satu ukuran produktifitas staf dan lembaga, mengingat selama ini eksekutif di SATUNAMA mempunyai tanggung jawab untuk mencari pembiayaan untuk menjalankan program-program lembaga. Dengan demikian rasanya tidak aneh apabila besarnya dana (khususnya pada *saving*) yang berhasil dikumpulkan bisa dijadikan indikator produktifitas staf. Dan untuk kebutuhan finansial dari SATUNAMA sendiri didapat dari Lembaga Donor yang dimana dari Lembaga donor tersebut mengharuskan SATUNAMA untuk melakukan kerjasama dengan pihak lain seperti pemerintah setempat ataupun pihak swasta. Oleh karena itu, tujuan dialaksanakannya sebuah relasi selain membantu SATUNAMA dalam menjalankan programnya juga sebagai tuntutan antar SATUNAMA dengan Lembaga Donor.

Banyaknya lembaga donor yang menjalin kerjasama dengan SATUNAMA membuat SATUNAMA sangat terbantu dalam hal pendanaan program ataupun perawatan aset yang dimiliki oleh SATUNAMA. Dari hal itu, dapat dilihat adanya indikasi hegemoni dari lembaga donor. Kerja sama yang saling menguntungkan yang menjadi kesepakatan dasar antara LSM dan lembaga dana bisa untuk diwujudkan meskipun terlihat adanya hubungan yang tidak setara antar keduanya. Lembaga-lembaga dana internasional memiliki kekuasaan untuk mengarahkan dan membentuk agenda kerja sama LSM. Dalam Faqih (2010) menuliskan bahwa banyak

agenda LSM lokal pada dasarnya ditentukan oleh lembaga internasional dan hubungan kekuasaan ini menyulitkan gerakan LSM di Indonesia untuk mengembangkan ideologi, visi dan agendanya sendiri (Faqih, 2010:157). Namun, hampir seluruh jaringan tersebut dibangun berdasarkan mutual-benefit dan dalam rangka kerjasama program. Dengan demikian hampir seluruh jaringan yang ada juga merupakan jaringan yang berbasis isu (*issue base*). Dalam banyak wacana dan diskusi, jaringan yang berbasis issue bisa lebih efektif dibanding dengan jaringan yang bersifat kewilayahan dan persamaan profesi – latar belakang. Karena hampir semua jaringan berbasis *issue* yang sedang digarap oleh SATUNAMA, dengan demikian semua jaringan tersebut masih relevan dan sesuai dengan visi – misi SATUNAMA.

3.2. Kerjasama SATUNAMA dengan Pemerintah DIY

Pendekatan hak asasi manusia menjadi landasan kerja SATUNAMA dalam menjalankan sebuah program. Sudah banyak kegiatan yang dilakukan SATUNAMA terkait isu Hak Asasi Manusia seperti Hak Anak, Hak para Kelompok Minorita, dan lain-lain. SATUNAMA menggandeng pemerintah dalam mensukseskan kegiatan tersebut dan hal itu sangat perlu adanya. Sebagaimana yang diketahui bahwa negara merupakan aktor yang memiliki kewajiban dalam memenuhi Hak Asasi Manusi untuk setiap warga negaranya. Kewajiban itu antara lain: non diskriminasi, kewajiban generik (menghormati, melindungi, memenuhi), dan kewajiban atas hasil. Warga

mempunyai hak atas Hak Asasi Manusia dan negara mempunyai kewajiban untuk memenuhi hak-hak itu. Maka dari itu, perlu adanya kerjasama dengan pemerintah terkait untuk menjalankan program-program tersebut, karena negara memiliki kewajiban dalam memenuhi Hak Asasi Manusia dan harus terlibat dalam pelaksanaannya.

SATUNAMA menggunakan pola relasi berdasarkan good governance yang dalam pola hubungan itu melibatkan negara, masyarakat dan aktor lainnya (swasta). Maka dalam implementasi suatu program atau kegiatan untuk hak asasi manusia harus melibatkan negara, mengakui adanya negara dan tidak menggantikan posisi negara. Maka dari itu, meskipun SATUNAMA memiliki relasi yang banyak di lembaga donor yang bisa menyediakan dukungan sumber daya untuk segala kegiatan SATUNAMA, namun SATUNAMA tetap berinteraksi dengan negara karena yang mempunyai kewajiban untuk menjalankan hak asasi manusia itu adalah negara di segala level, baik pemerintah daerah maupun desa dan dalam membangun sebuah ideologis LSM yang baik harus memiliki hubungan dari ketiga objek tersebut, Negara, Masyarakat dan swasta. SATUNAMA mempunyai tanggungjawab untuk berkontribusi dalam menjalankan kegiatan dalam memenuhi Hak Asasi Manusia dan Negara memiliki kewajiban untuk memajukan, melindungi, menghormati dan memenuhi Hak setiap warga negaranya. SATUNAMA menempatkan posisi sebagai *intermediary* yaitu tidak menggantikan negara tidak pula

menggantikan rakyat (*intermediary agency*). SATUNAMA hanya menguatkan rakyat untuk bisa menyuarkan aspirasinya ke negara.

SATUNAMA dalam poin advokasi memiliki cara yang berbeda. SATUNAMA tidak hanya memposisikan diri sebagai mediator dari masyarakat ke pemerintah tetapi juga mendampingi rakyat agar bisa menyampaikan aspirasinya kepada pemerintah. Pemerintah Provinsi DIY yang dikatakan sebagai percontohan bagi pemerintah provinsi lainnya masih belum bisa dikatakan sempurna. Masih banyak kebijakan publik yang dilakukan oleh pemerintah DIY yang masih dipertanyakan kredibilitasnya. DIY yang masuk dalam salah satu daerah yang diistimewakan dan diberikan dana Istimewa dari APBN (Anggaran Pendapatan Belanja Negara) masih belum bisa dikatakan sukses dalam merealisasikan dana istimewa itu untuk kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat. Pendekatan yang dilakukan SATUNAMA dalam hal ini yaitu dengan memberikan pelatihan kepada masyarakat untuk bisa benar-benar menyampaikan aspirasinya kepada pemerintah. Seperti yang dikatakan oleh Michle Foucault dalam teori kekuasaan. Bagi Foucault, kekuasaan dan pengetahuan adalah dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Melalui proses 'pendisiplinan' dan normalisasi', serta proses penggunaan pengetahuan, dapat mengontrol pemerintah untuk tidak mendominasi masyarakat dan masyarakat yang terhegemony oleh pemerintahpun menjadi berkurang dan mulai kritis dalam menilai kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah.

SATUNAMA yang merupakan bagian dari gerakan rakyat melakukan pendekatan partisipatif ketimbang pendekatan penjinakan (*domestication*), kooptasi, penundukan (*subjection*), dan pendominasian. Pendekatan pasrtisipatif yang dilakukan oleh SATUNAMA yaitu dengan melakukan kegiatan pendidikan publik untuk mengembangkan demokrasi seperti Sekolah Perempuan Desa yang dilaksanakan di Duwet, Sendangadi, Mlati, Sleman. Program ini merupakan salah satu wujud dari kerjasama yang dilakukan oleh Yayasan SATUNAMA dengan pemerintah Desa Sendangadi.

Kegiatan ‘Sekolah Perempuan Desa’ itu bertujuan untuk meningkatkan daya kritis perempuan dalam melihat potensi dan persoalan perempuan baik remaja maupun ibu-ibu di pedesaan. Perempuan yang masih dianggap kelompok kelas dua, dimana masih ada peminggiran terhadap status dan peran perempuan di lingkungan masyarakat. Mengenai hal ini, SATUNAMA hadir di tenga-tengah masyarakat untuk membantu kebutuhan masyarakat yang pemerintah sendiri sulit untuk menjangkaunya. SATUNAMA memberikan pendidikan untuk masyarakat desa yang memang membutuhkan hal itu. Dalam kontes perjuangan ideologi (perlawanan trhadap hegemoni dominan), pendidikan adalah peran krusial intelektual organik dalam memunculkan kesadaran kelas dan bagi Gramsci (1971), sekolah adalah contoh aparat formal bagi penyebaran ideologi (Fakih, 2010:60).

Nama LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat) yang digunakan di Indonesia dibanding Ornop (Organisasi non-pemerintah) menunjukkan bahwa LSM bukanlah organisasi anti pemerintah atau tidak bermaksud meruntuhkan ideologi pembangunan negara selagi hal itu tidak merugikan dan mengeksploitasi masyarakat. Nama LSM itu juga menghindari konotasi buruk “anti” pemerintah. Meskipun menurut Fakih (2010) menuliskan bahwa perlu ada perubahan nama dari LSM menjadi Ornop karena dirasa banyak LSM yang memposisikan diri sebagai bagian dari organisasi negara atau pemerintah (Fakih, 2010:155). Namun, hal itu bukanlah tentang persoalan nama tetapi bagaimana organisasi yang dikatakan sebagai gerakan masyarakat itu benar-benar memposisikan diri sebagai bagian dari gerakan masyarakat dan untuk kepentingan masyarakat serta untuk kemajuan suatu negara.

Harmonisasi yang dibangun SATUNAMA dengan pemerintah dapat dilihat dari kerjasama SATUNAMA dengan Pemerintah di DIY. Kegiatan kerjasama yang dilakukan yaitu memberikan pelatihan dan pendampingan terhadap aparatur pemerintah Desa. Kabupaten yang melakukan kerjasama dengan SATUNAMA dalam hal ini antara lain; Pemerintah Kabupaten Sleman, Bantul dan Gunung Kidul. Kegiatan yang dilakukan berupa memfasilitasi pemerintah kecamatan desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, dimulai dari tata kelola, perencanaan pembangunan serta memfasilitasi inisiatif Badan Usaha Milik Desa. Hal itu sangat baik

adanya, karena sebagaimana yang diketahui bahwa masyarakat desa khususnya aparat desa yang notabennya memiliki keterbatasan pendidikan dan masih perlu banyak pendampingan dari berbagai lembaga.

Konsistensi kerjasam SATUNAMA dengan pemerintah DIY masih tetap terjaga hingga akhir tahun 2017. Terhitung dari tahun 2012 hingga tahun 2017, banyak kegiatan kerjasama yang dilakukan oleh SATUNAMA dengan pemerintah DIY. Hal itu dapat dilihat dari program kerja yang dilakukan SATUNAMA di akhir tahun ini tentang Urban. Program ini dilaksanakan di Aliran sungai Winongo yang dalam pelaksanaan programny SATUNAMA berkomunikasi dengan BAPEDDA Kota Jogjakarta dan juga dengan fokum SDGes Yogyakarta dalam mendiskusikan tentang inisiasi sistem informasi sungai dan perkotaan. Hal yang melatarbelakangi adanya program tersebut yaitu integrasi data yang selama ini dilihat bahwa proses-proses perencanaan pembangunan di Yogyakarta, program-program pemerintah kota Jogja khususnya terkait dengan penanggulangan kemiskinan masih terdapat celah-celah yaitu tidak tepat sasaran. Hal tersebut dikarenakan data yang berbeda-beda dari Dinas Sosial, Dinas Tenaga Kerja, Bappeda, BPS. Dari permasalahan di atas yang melatarbelakangi keinginan SATUNAMA untuk menyelesaikan persoalan tersebut adalah untuk mengintegritaskan seluruh data yang dalam prosesnya menyamakan semua indikator dari tiap-tiap Dinas.

Dalam dilakukannya sebuah kerjasama antara Yayasan SATUNAMA dengan Pemerintah, ada aturan main atau yang biasa disebut sebagai MoU dalam menjalankan program kegiatan kerjasama. Hal memang perlu dilakukan untuk menjaga agar tanggungjawab antar kedua belah pihak terlaksana. Ada aturan main tersebut berupa perjanjian secara tertulis. Didalam MoU yang dibuat oleh SATUNAMA dan Pemerintah, membahas terkait program dan juga pembahasan terkait anggaran. Namun, keinginan dari SATUNAMA sendiri terkait aturan main tersebut tidak ingin terjebak dari nominasi anggaran ataupun dalam ritme birokrasi. Yayasan SATUNAMA memiliki beberapa mitra-mitra donor yang dalam hal ini mitra-mitra tersebut mewajibkan SATUNAMA untuk membuat skema adanya kontribusi lokal ataupun kerjasama dengan pihak ketiga yang dituangkan ke dalam proposal dan hal itu merupakan syarat utama, oleh karena itu dalam melakukan kerjasamanya harus memiliki perjanjian atau aturan main.

3.2.1 Target dari Relasi SATUNAMA dengan Pemerintah DIY

Menjalin sebuah relasi dengan lembaga-lembaga besar seperti pemerintah merupakan hal yang baik adanya khususnya bagi LSM yang merupakan gerakan masyarakat sipil yang menjadi mediator antar masyarakat dengan pemerintah. Adanya relasi membuka potensi untuk bisa mengenal antar dua lembaga yang saling bekerjasama. Target atau pencapaian yang ingin di dapatkan oleh SATUNAMA dalam melakukan

kerjasama dengan pemerintah yaitu bisa mengintervensi kebijakan publik. Mengintervensi dalam arti, jika terdapat temuan dalam kebijakan publik yang tidak sesuai dengan hak warga negara. Kebijakan publik (isi, tata laksana, budaya kebijakan publik) dibuat tidak ramah / tidak akses (*inaccessible*) kepada kondisi-kebutuhan khusus masyarakat, kebijakan publik yang dibuat eksklusif dan tidak inklusif, kebijakan publik yang tidak berbasis pendekatan hak asasi manusia, kebijakan publik tidak memadukan aspek keberlanjutan-kelestarian.

Dengan adanya kerja sama, interaksi dan memiliki hubungan yang baik dengan pemerintah DIY khususnya, SATUNAMA dapat dengan mudah melakukan upaya-upaya untuk mengintervensi para pelaku penatalaksanaan kebijakan publik dalam mengubah kebijakan untuk memenuhi hak-hak warga negara.

3.2.2 Hambatan dalam Hubungan Kerjasama

Hambatan yang ditemukan dalam kerjasama yang dilakukan antara Pemerintah dengan Yayasan SATUNAMA yaitu pada nilai dan pola pikir yang berbeda. Sebagian pemerintah beranggapan bahwa masyarakat desa khususnya merupakan masyarakat yang kurang terdidik, sehingga dalam merealisasikan program untuk pembangunan masyarakat disesuaikan dengan *deadline* tanpa memperdulikan apakah hal tersebut sudah dapat diterima oleh masyarakat atau belum. Pola pikir pemerintah yang menganggap bahwa masyarakat hanyalah objek dari pembangunan berbanding terbalik dengan pola pikir dari

SATUNAMA. Disini dapat dilihat kurang kritisnya pemerintah dalam menjalankan suatu pembangunan di masyarakat. Program pembangunan pemerintah cenderung memiliki skala nasional yang besar, sedangkan program LSM cenderung merupakan proyek lokal berskala kecil di tingkat akar rumput. Demikian halnya dengan perbedaan pendekatan mereka, jika proyek-proyek pemerintah cenderung dikembangkan dan di rancang dari atas, sedangkan proyek LSM dikerjakan melalui pendekatan lokal yang lebih bersifat partisipatif. Seperti yang dikatakan oleh salah satu anggota PMD, Wijiyati:

“Pemerintah masih berpikir bahwa yang mempunyai aspirasi itu bukanlah masyarakat (difabel). Cara pikir yang tidak memandang kualitas melainkan kuantitas. Kerangka pendekatan hak asasi manusia belum sepenuhnya di terapkan dan dihayati. Pemerintah masih menghitung kualitasnya , “kalo ga banyak buat apa dilakukan” kata orang pemerintahan seperti itu. Jika berbicara tentang hak asasi manusia, tidak peduli berapa jumlahnya, meskipun hanya satu sekalipun tetap harus dibela, karena dia adalah manusia yang memiliki hak atas Hak Asasi Manusia”

Pemerintah dalam hal kerjanya harus sesuai deadline karena terpaku dengan perencanaan anggaran yang harus diselesaikan secepatnya dan tidak ada konsekuensi. Jika dalam merealisasikan program/kegiatan dinas terkait tidak dapat menghabiskan anggaran yang sudah direncanakan awal maka dianggarap tidak produktif dan tidak berkinerja dengan dengan baik karena berpatokan dengan penyerapan anggaran yang sedikit itu meskipun dalih menghemat

anggaran tersebut. Sehingga yang muncul adalah semangat untuk menghabiskan anggaran dan tidak mengutamakan output dari indikator pencapaian. Realisasi dalam kebijakan anggaran yaitu pemerintah wajib semaksimal mungkin menggunakan sumber-sumber pendapatan anggaran pemerintah untuk pembelanjaan terkait dengan pemenuhan HAM seperti pendidikan, kesehatan, pekerjaan, dll. Sehingga tidak ada celah untuk para koruptor bisa bergerak. Namun disini, SATUNAMA tidak dapat menyesuaikan sesuai dengan porsi pemerintah jika dalam program perberdayaan tersebut membutuhkan waktu yang lebih dari waktu yang sudah ditentukan oleh pemerintah. Dalam kinerjanya, SATUNAMA lebih melihat pada kualitas bukan kuantitas. Maka dari itu, hal tersebutlah yang terkadang sering menjadi masalah dalam kerjasama antara SATUNAMA dengan Pemerintah. Dalam ritme kerjasama seperti itu, respon dari pemerintah sendiri kadang bisa membatalkan kerjasama dengan SATUNAMA. Namun, hal itu hanya ada pada beberapa aktor pemerintah saja dan masih tersisa banyak aktor-aktor pemerintah yang melakukan kerjasama dengan SATUNAMA yang dalam perencanaan pembangunannya melihat dari segi kualitas tidak hanya kuantitas. Seperti yang dikatakan oleh ketua Departemen PMD, Asep:

“Pemerintah bisa saja membatalkan kerjasama itu dengan masalah tersebut. Namun hal tersebut hanya beberapa saja dari pemerintah yang terbilang tidak waras dalam perencanaan program tersebut dan masih tersisa aktor-aktor pemerintah yang memang benar-

benar waras dalam mencanangkan program kerjasama tersebut yang benar-benar untuk masyarakat dan melihat kualitas dan tidak hanya kuantitas”

Dari persoalan tersebut dapat dilihat bahwa relasi kuasa yang ada antar LSM Satunama dengan Pemerintah tidak mendominasi antara satu sama lain. Pemerintah yang biasa dikenal dengan aktor yang menjadi pemegang kekuasaan tertinggi di suatu negara tidak tampak terlihat dari SATUNAMA. SATUNAMA menjadikan pemerintah sebagai aktor yang bekerjasama dengan mereka dalam merealisasikan program-program untuk keberlangsungan masyarakat. Jika dalam melakukan kerjasama dengan pemerintah ada hal-hal yang tidak sesuai dengan visi misi dari SATUNAMA, maka hal itupun tidak akan terlaksanakan. Dan jika adanya pembatalan kerjasama tersebut, SATUNAMA sama sekali tidak memiliki kerugian dalam hal itu. Karena, SATUNAMA sendiri memiliki tabungan yang cukup untuk membiayai kebutuhan gaji *staff* dan perawatan aset SATUNAMA hingga 15 tahun kedepan. Hal tersebut dapat dikatakan karena, SATUNAMA memiliki relasi dengan lembaga donor yang sangat banyak. Dalam kurun waktu 2012 – 2016, sumber pendanaan setiap tahun selalu didukung antara 5 – 8 lembaga dana, dan setiap tahun selalu ada lembaga dana baru. Bahkan pada tahun 2016 bisa hadir 3 mitra donor baru. Tentu saja semuanya itu merupakan bagian dari hasil kerja staf dan atau Departemen dan Unit. Ditambah lagi, dalam salah satu konsep keberlanjutan lembaga, adanya 5 sumber dana atau lebih dapat dikatakan lembaga dalam posisi relative ‘*save*’.

SATUNAMA – Donor (Lembaga donor pada tahun 2016 adalah ; TAF Program Peduli, KAS, Misereor, Kindermission, MCAI, KPK – PCB, AVI)

3.3 Relasi Kuasa dalam Konsep Governnace

Dalam konteks *governance* pola relasi kekuasaan ditandai dengan hadirnya masyarakat (institusi atau komunitas), pemerintah (pusat dan daerah), dan pasar (pelaku bisnis interpreneur). Pemerintah bagi SATUNAMA bukan satu-satunya aktor yang berperan penuh atau memiliki kekuasaan secara mutlak. Relasi pada dasarnya merupakan bentuk konkret hubungan yang terbentuk karena adanya interaksi dari unsur dua pihak atau lebih. Pihak-pihak yang terlibat tersebut memiliki kepentingan dan tujuan masing-masing. Dan SATUNAMA memiliki tujuan untuk membantu masyarakat menyuarakan aspirasi dan keinginan mereka untuk memenuhi hak-hak mereka kepada pemerintah.

Relasi kuasa SATUNAMA dengan pemerintah DIY dapat dikatakan sebagai model kemitraan (*partnership*). Model kemitraan merupakan model hubungan yang dibentuk dari dua pihak yaitu SATUNAMA dan pemerintah. Model kemitraan yang ada dalam relasi kuasa antara SATUNAMA dengan pemerintah dibentuk dengan kepercayaan satu sama lain dan kesetaraan. Sehingga masyarakat sipil,

masyarakat ekonomi, dan masyarakat politik bersama dengan pemerintah dapat bekerja sama.

Model kemitraan yang dibangun dalam relasi kerjasama SATUNAMA dengan pemerintah dapat dilihat dari respon Pemerintah DIY terhadap segala program atau kegiatan yang dilakukan oleh SATUNAMA. Tercatat bahwa dari tahun 2012 – 2017 program kerjasama SATUNAMA dengan pemerintah berjalan dengan baik adanya dan respon dari pemerintah terhadap program kerja untuk masyarakat pun sangat baik. Dari sekian banyak program yang dilakukan oleh SATUNAMA, hanya ada beberapa pemerintah Kabupaten yang kurang dalam dukungan terhadap SATUNAMA. Hal itu dapat dilihat dari hasil kegiatan Sekolah Perempuan di Dengok, Playen Gunung Kidul. Dalam kegiatan ini Satunama mencari dukungan dari pemerintah desa, namun karena kesibukan dari pemdes, maka peran lebih banyak dimainkan oleh Satunama. Selain itu, banyak kegiatan-kegiatan SATUNAMA yang mendapat dukungan dari pemerintah seperti pada Seminar dan Loklatih Pendidikan Politik : Perempuan & Politik: Menjadi pemilih yang kritis dalam pemilu 2014. Kegiatan ini mendapat dukungan dari pemerintah kabupaten dan kecamatan untuk menggalang kehadiran peserta dari perwakilan kecamatan dan perwakilan di 5 Dapil yang ada di wilayah Gunungkidul.

Ada 3 (tiga) pola yang terbentuk antara Pemerintah dengan masyarakat, yaitu Otoritarian, transisional dan pola demokratis. Dalam pola hubungan antara pemerintah dengan SATUNAMA masuk dalam kategori pola demokratis, yaitu tidak ada tempat tertinggi antara pemerintah dengan SATUNAMA. Posisi antar kedua lembaga tersebut setara dan SATUNAMA sebagai LSM dan gerakan sipil memposisikan diri setara dengan pemerintah. Memang pada dasarnya kebanyakan pemerintah menginginkan posisi superior dalam menjalankan hubungan dengan LSM. Namun, hal ini tidak lagi diiyakan oleh SATUNAMA.

Pemerintah tidak lagi melakukan dominasi seperti yang pada umumnya diketahui bahwa banyak LSM yang menggunakan pola otoritarian dengan pemerintah. Hal ini dapat dilihat dari program kerjasama yang dilakukan oleh pemerintah dengan SATUNAMA pada tahap pembuatan perjanjian MoU. Jika ada hal-hal yang berbenturan dengan ideologi SATUNAMA seperti perbedaan pola pikir pemerintah yang berbeda terkait deadline pelaksanaan kegiatan yang harus sesuai dengan perencanaan anggaran namun hal itu belum tentu dapat diterima oleh masyarakat, maka SATUNAMA pun tidak berani untuk mengambil program kerjasama tersebut. seperti yang dikatakn oleh salah satu anggota PMS SATUNAMA, Asep:

“Dalam ritme kerjasama seperti itu, respon dari pemerintah sendiri kadang bisa membatalkan kerjasama dengan SATUNAMA. Namun, hal itu hanya ada pada beberapa aktor pemerintah saja”

Banyak LSM yang menempatkan posisi pemerintah pada tempat tertinggi sedangkan mereka berada di posisi subordinatif. Negara mendominasi proses pengambilan keputusan maupun dalam implementasi kebijakan. Fakih (2010) menuliskan bahwa mayoritas aktivis dalam gerakan LSM di Indonesia secara ideologis dan teoretis pada dasarnya pendukung developmentlism yaitu menerima konsep pembangunan apa adanya tanpa mempertanyakan secara kritis. Posisi struktural kebanyakan LSM di Indonesia sebagai bagian dari hegemoni negara sehingga dapat dikatakan banyak LSM di Indonesia lebih merupakan bagian dari negara ketimbang bagian dari masyarakat sipil. Pada akhirnya, mayoritas masyarakat dikondisikan pada posisi pasif dan perannya nyaris terpinggirkan. Dinamika dalam proses pengambilan keputusan yang ada lebih merupakan refleksi dari kompetisi kepentingan antar sejumlah aktor pemerintah.

Tidak hanya pola demokratis yang dilihat antara SATUNAMA dengan pemerintah. Pola hubungan transisional juga terlihat dalam hubungan relasi ini. SATUNAMA membuat sosok dominan dari

pemerintah atau negara tidak lagi ada dan memunculkan partisipasi masyarakat. Pola ini dapat dilihat dari beberapa kegiatan yang dilakukan SATUNAMA dalam membantu menyuarakan aspirasi masyarakat terkait kepercayaan atau keyakinan suatu masyarakat untuk diakui. Kepedulian SATUNAMA terhadap isu inklusi dalam hal penganut kepercayaan Sapta Darma di Kulonprogo untuk mendapatkan akses identitas yang sudah diajukan ke Mahkamah Konstitusi untuk menyetujui “penganut kepercayaan bisa masuk di KTP”. Dalam insiasi ini tidak hanya ada SATUNAMA, LSM di Indonesia lainnya juga ikut serta dalam menyuarakan hal itu. Program ini dibuat untuk para penganut kepercayaan Sapta Darma agar kehadiran mereka bisa diterima dari sisi mereka sebagai penganut kepercayaan dalam memperoleh hak-haknya sebagai masyarakat seperti tempat tinggal, pendidikan akte kelahiran dan lain-lain.

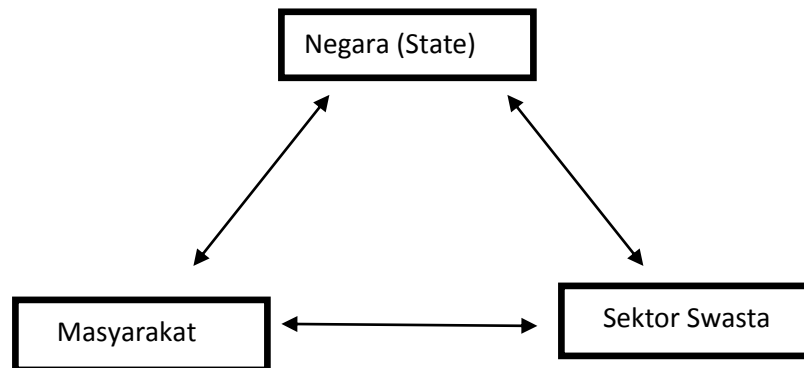
SATUNAMA bersama LSM lainnya berhasil dalam mengintervensi Pemerintah atau negara dalam membuat kebijakan. Tidak ada lagi dominasi dari pemerintah. Inisiasi SATUNAMA dengan LSM lainnya membawakan hasil yang baik untuk para penganut kepercayaan Sapta Darma di Kulonprogi itu. MK mengabulkan gugatan atas Pasal 61 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 dan Pasal 64 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan yang mewajibkan mengisi kolom agama di kartu tanda penduduk. Hal ini

membuat para penganut kepercayaan bisa mencantumkan [aliran kepercayaan](#) di kolom agama saat membuat KTP. Seperti yang dilansir dalam [nasionaltempo.com](#), Ketua MK, Arief Hidayat, mengatakan pihaknya mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya. "Menyatakan Pasal 61 ayat (2) dan Pasal 64 ayat (5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat," katanya dalam pembacaan putusannya di Gedung MK, Selasa, 7 November 2017.

Pola hubungan demokratis yang diciptakan SATUNAMA dalam hubungannya dengan pemerintah membuat pemerintah tidak lagi melakukan dominasi. Pemerintah dan masyarakat dan aktor lainnya sama-sama diikat oleh satu aturan main untuk saling mengisi dan mendorong serta ada interaksi timbal balik dalam proses pengambilan kebijakan dan implementasi kebijakan. SATUNAMA dalam melakukan kegiatan maupun programnya diaplikasikan berdasarkan 3 pola hubungan dalam konsep *governance* yaitu ditandai dengan hadirnya masyarakat (institusi atau

komunitas), pemerintah (pusat dan daerah), dan pasar (pelaku bisnis *interpreneur*). . Berikut ini skema pembuatan program SATUNAMA.

Gambar 3.1. *Skema Pembuatan Program SATUNAMA*



Sumber: wawancara dengan Dept. PMD

Skema pembuatan program yang digunakan oleh SATUNAMA mirip dengan konsep relasi kuasa berdasarkan *good governance*. Skema pembuatan program ini mencirikan LSM yang benar-benar memfokuskan diri sebagai gerakan sipil demi kesejahteraan masyarakat. Dalam skema di atas, SATUNAMA memposisikan diri di tengah-tengah antara negara dengan masyarakat. Hal itu sesuai dengan posisi yang harusnya ditempatkan oleh para aktor *intermediary*. Memposisikan diri sebagai jembatan penghubung antara masyarakat ke negara. Tidak hanya dalam hal menjembatani masyarakat dengan negara, para aktor *intermediary* juga perlu dalam melakukan pemberdayaan terhadap masyarakat. Para aktor *intermediary* yang merupakan aktor intelektual di lingkungan masyarakat memang harus memposisikan diri sebagai LSM yang

dapat memberikan pengetahuan kepada masyarakat agar terciptanya daya kritis dan analisis masyarakat terhadap segala fenomena yang terjadi dalam suatu negara. Fakhri (2010) menuliskan bahwa, ada beberapa peran yang dapat dimainkan oleh aktivis dalam posisi tersebut, adalah: Pertama, aktivis memegang suatu posisi dalam gelanggang produksi pengetahuan. Kedua, mereka dapat menciptakan ruang sehingga masyarakat dapat menganalisis struktur dan sistem yang ada yang memarginalkan, mendominasi dan mengeksploitasi mereka dan menyebarkan hasil analisis kepada seluruh masyarakat. Ketiga, mereka dapat menciptakan ruang guna memunculkan kesadaran kritis (Fakhri, 2010:159)

SATUNAMA dalam kegiatannya sendiri melaksanakan program *Capacity Building* di masyarakat agar membuat posisi masyarakat setara dengan Negara dan pihak-pihak non-State. Spirit dalam *capacity building* yaitu terletak pada sasarannya. Sasaran dari Satunama sendiri dalam *capacity building* yaitu memilih indikator masyarakat diantaranya masyarakat KLMTD (Kecil, Lemah, Miskin, Tertindas dan Difabel). Tidak hanya memberdayakan masyarakat, SATUNAMA juga bertindak dalam mengintervensi Negara maupun Swasta dalam hal peningkatan hak-hak yang harus diperoleh oleh masyarakat. Dari hasil wawancara dengan Ibu Wiji (anggota PMD SATUNAMA) mengatakan bahwa:

“pernah saya mendampingi salah seorang difabel (Tuli) untuk bertemu dengan ketua BAPEDDA DIY dalam menyampaikan keinginan dia dari pemerintah. Penyandang difabel itu juga sudah didampingi oleh penerjemah dari kawan difabel juga. Tapi respon dari ketua BAPEDDA

seperti ini “kenapa ga mba Wiji saja yang menyampaikan” padahal kan harusnya memang mereka (masyarakat) yang menyampaikan langsung aspirasi mereka bukan LSM, LSM hanya sebagai mediator yang menghubungkan masyarakat dengan negara, bukan mewakili masyarakat ke pemerintah”

Dari persoalan ini dapat dilihat kurangnya kesadaran pemerintah dalam menanggapi hal-hal tersebut. pola pikir pemerintah yang masih eksklusif terhadap isu-isu itu membuat SATUNAMA untuk selalu berusaha mengajak pemerintah untuk berfikir inklusif dalam menanggapi hal-hal tersebut. Masyarakat (difabel) bukanlah masyarakat yang harus diperlakukan khusus dan dibedakan dengan masyarakat normal tetapi mereka harus dirangkul dan disediakan kebutuhan yang menunjang mereka untuk tetap berinteraksi layaknya orang normal dengan usaha mereka sendiri

Dan seperti yang sudah diketahui bahwa, dalam sebuah perencanaan pembangunan harus adanya kolaborasi dari 3 (Tiga) sektor tersebut yaitu Masyarakat, Pemerintah dan Swasta. Dan skema yang dibuat oleh SATUNAMA ini sesuai dengan siklus perencanaan pembangunan *good governance*.

3.4 SATUNAMA sebagai *Civil Society*

Masyarakat sipil berbeda dengan negara atau masyarakat politik, dan adalah lingkup privat dari individu. Masyarakat sipil terdiri dari berbagai bentuk organisasi *volunteer*, dan merupakan dunia politik utama, dimana semua itu berada dalam aktivitas ideologis dan intelektual yang dinamis maupun konstruksi

hedemoni. Selain itu bagi Gramsci, masyarakat sipil adalah konteks dimana seseorang menjadi sadar, dan seseorang pertama kali ikut serta dalam aksi politik. Dengan demikian, masyarakat sipil adalah suatu agregasi atau percampuran kepentingan, dimana kepentingan sempit ditransformasi menjadi pandangan yang lebih universal sebagai ideologi dan dipakai atau diubah, serta dimana aliansi dibentuk. Dalam konteks ini, bagi Gramsci (1971), masyarakat sipil adalah suatu dunia di mana rakyat membuat perubahan dan menciptakan sejarah (Mansoer Fakhri, 2010)

Peran Masyarakat Sipil dalam Pembangunan

Lembaga Swadaya Masyarakat yang masuk dalam kategori aktor non-eksternal intermediary merupakan pilar penegakkan masyarakat sipil (*civil society*). *Civil Society* memiliki beberapa fungsi, antara lain; (1) Pengawasan terhadap Negara, (2) Mediator partisipasi masyarakat, (3) *Civic Education*. Dari ketiga fungsi tersebut, SATUNAMA sudah menjalankannya dan bahkan banyak produk unggulan dari SATUNAMA dibuat untuk menjalankan 3 (tiga) fungsi tersebut, antara lain CEFIL (*Civic Education for Future Indonesia Leadersip*), Guyub Bocah yang merupakan komunitas yang fokus pada pemenuhan hak-hak anak di wilayah Jateng-DIY.

Dalam fungsinya sebagai *civil society*, LSM melakukan program-program pemberdayaan masyarakat, advokasi dari masyarakat ke pemerintah dan juga pengawasan terhadap negara dan pendidikan masyarakat. Contohnya seperti program yang dilakukan oleh SATUNAMA yaitu peduli terhadap isu inklusi

dalam hal penganut kepercayaan Sapta Darma di Kulonprogo untuk mendapatkan akses identitas yang sudah diajukan ke Mahkamah Konstitusi untuk menyetujui “penganut kepercayaan bisa masuk di KTP”. Dari contoh kegiatan yang dilakukan oleh SATUNAMA terhadap isu tentang kepercayaan di Kulonprogo ini memcerminkan bahwa jiwa demokratis sangat dipegang teguh oleh SATUNAMA. Karena SATUNAMA dalam melakukan kinerjanya selalu berlandaskan pada Hak Asasi Manusia, yang menyatakan bahwa semua warga berhak mendapatkan hak-haknya sebagai warga negara.

Dalam kebijakan masyarakat sipil, SATUNAMA juga melakukan pemberdayaan kepada masyarakat. Seperti halnya yang dilakukan SATUNAMA dalam program pemberdayaan yang bekerjasama dengan pemerintah dalam inisiasi usaha produktif di Kulonprogo, Gunung Kidul dan Bantul. Posisi LSM ini hanya sebagai pemantik kepada pemerintah terhadap kebutuhan-kebutuhan masyarakat. Dan segala cerita kesuksesan dari hasil kinerja SATUNAMA dalam melakukan program-program pemberdayaan tersebut akan diserahkan ke Pemerintah untuk ditindak lanjuti oleh pemerintah itu sendiri.

Sudah.

SATUNAMA dalam menjalin kerjasama dengan pemerintah tidak lantas langsung mendapat dukungan begitu saja, melainkan dengan melakukan pendekatan dengan pemerintah terkait. Pemerintah juga tidak hanya langsung menjalin kerjasama dengan SATUNAMA begitu saja tanpa melihat kesesuaian

program yang akan dilakukan oleh pemerintah dengan rancangan program yang juga akan dilakukan oleh SATUNAMA. Oleh karena itu, banyak kegiatan yang dilakukan oleh satunama yang mendapat dukungan dari pemerintah karena sesuai dengan keinginan atau terdapat kesesuaian dengan program pemerintah dan hal itu juga berdampak positif di lingkungan masyarakat.

Hal yang menarik dari SATUNAMA dibandingkan dengan LSM lain yang ada di Indonesia adalah pada program-program yang dilakukan oleh SATUNAMA. SATUNAMA yang fokus pada pendampingan, pemberdayaan masyarakat dan advokasi dapat menggunakan semua isu dalam pembuatan program, seperti Hask Asasi Manusia, Lingkungan, kesetaraan gender, kaum difabel, dan lain-lain. Tidak ada keterbatasan isu dalam pembuatan program SATUNAMA. Dan hal itu didukung dengan sumber daya dan alat pendukung lainnya yang dapat menunjang untuk terealisasinya sebuah kegiatan. Kebanyakan LSM di Yogyakarta dibentuk berdasarkan fokus lembaga masing-masing, seperti Rifka Annisa yang fokus terhadap isu-isu perempuan, kesetaraan gender, dan kekerasan pada perempuan dan anak. Contoh LSM lainnya seperti Yayasan Dunia Damai Museum Anak Kolong Tangga yang merupakan organisasi non profit yang bergerak di bidang seni, budaya dan pendidikan alternatif bagi anak-anak.